

Gejala dan Implikasi dari Eskalasi Minat Masyarakat pada Jurusan DKV dalam Konstelasi Pemikiran Jevons: Kelindan Utilitarisme dengan Ekonomi

Ferdinand Indrajaya

Desain Komunikasi Visual
Fakultas Desain
Universitas Pelita Harapan
Indonesia
ferdinand.indrajaya@uph.edu

Phebe Valencia

Desain Interior
Fakultas Desain
Universitas Pelita Harapan
Indonesia
phebe.valencia@uph.edu

Diterima: Juni, 2025 | Disetujui: November, 2025 | Dipublikasikan: Desember, 2025

ABSTRAK

Isi tulisan dalam artikel ini merupakan sebuah bentuk upaya untuk menelisik gejala dari beberapa tahun terakhir mengenai eskalasi minat masyarakat terhadap jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV). Gejala ini akan ditelisik melalui lensa teoritis filsafat utilitarian yang berkelindan dengan teori ekonomi. Lensa teoritis yang dimaksudkan tersebut menunjuk ke pemikiran utilitarian ekonomi dari William Stanley Jevons. Pemikirannya yang mencakup persoalan tentang kebahagiaan, ekonomi, dan juga pendidikan akan dipaparkan untuk menunjukkan keterkaitannya dengan gejala terkait beserta implikasinya. Implikasi yang dimaksudkan menunjuk ke permasalahan etis, antropologis, dan juga politis. Secara metodologis, artikel ini ditulis dengan menggunakan metode studi pustaka. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara analitis-kritis dan membangun sintesa dari sumber-sumber pustaka yang dipilih. Sumber pustaka yang dipilih adalah sumber pustaka yang memuat, pertama, pemikiran utilitarian Jevons tentang kesepadanan hubungan antara kebahagiaan dengan

kesejahteraan ekonomi serta peran pendidikan di dalamnya. Kedua, sumber pustaka yang berkenaan dengan pemahaman masyarakat pada umumnya tentang jurusan DKV dan pendidikan tinggi. Dalam sitematikanya, tulisan dalam artikel akan diawali dengan pemaparan tentang gejala eskalasi minat masyarakat terhadap jurusan DKV beserta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, pemikiran utilitarian ekonomi dari Jevons, relasinya dengan pendidikan, dan implikasi dari penerapannya, akan disampaikan.

Kata Kunci: Utilitarisme, Ekonomi, Kebahagiaan, Pendidikan, DKV

PENDAHULUAN

Peningkatan minat masyarakat untuk menggeluti dunia Desain Komunikasi Visual (DKV) di Indonesia mendapatkan signifikansinya semenjak tahun 1980-an dan terus bergerak secara dinamis hingga masa kini (Ritonga et al, 2003, p. 3). Hal ini dapat ditunjukkan dengan menjamurnya jurusan DKV di banyak universitas. Sampai pada tahun 2007, pertumbuhan jurusan DKV dalam 13 tahun keberadaannya telah mencapai angka 300 persen (Adityawan, 2007). Adityawan (2007) juga turut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu tahun 2006-2007, ada sekurang-kurangnya tujuh puluh jurusan DKV Strata 1 telah berdiri di Indonesia dengan empat belas diantaranya berlokasi di Jakarta (Adityawan, 2007).

Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan tinggi DKV tersebut paralel dengan tingginya minat anggota masyarakat untuk menggelutinya. Dalam hal ini, logika sederhana dalam ekonomi pasar tentang relasi antara pasokan (supply) dan permintaan (demand) berlaku: jumlah jurusan DKV yang didirikan merupakan pasokan terhadap banyaknya peminat yang hendak mempelajarinya. Pertanyaan lanjut yang dapat diajukan adalah faktor apa yang menumbuhkan minat banyak anggota masyarakat untuk memilih jurusan DKV? Jawaban yang paling populer diberikan (selain sebagai kanal bagi kreativitas dan mampu menghindari Matematika) erat terkait dengan pertimbangan ekonomi, yakni kemudahan mendapatkan pekerjaan serta fleksibilitas dalam menjalankannya (Prastiwi & Ihsan, 2023).

Peluang mendapatkan pekerjaan yang bersentuhan dengan jurusan DKV sesungguhnya semakin meningkat pada masa kini didukung oleh teknologi internet yang telah lumrah dicandra dalam kehidupan sehari-hari. Seorang sarjana DKV tidak hanya dapat bekerja sebagai Desainer Grafis semata, yang kebanyakan luarannya terwujud dalam bentuk media cetak, akan tetapi juga sebagai Desainer Situs Daring (Website Designer), Videografer, Animator, dan Desainer Aplikasi (Adit, 2023). Banyaknya perusahaan bisnis dan industri yang menempatkan media sosial daring sebagai sarana promosi, juga turut membuka peluang bagi para lulusan DKV untuk berkontribusi sebagai Ilustrator ataupun Fotografer.

Fleksibilitas, di sisi lain, menunjuk ke kelenturan status seseorang dalam mengerjakan proyek-proyek DKV. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa/i umumnya sudah dapat bekerja sebagai desainer lepas untuk mengerjakan proyek DKV tertentu tanpa harus meninggalkan statusnya sebagai peserta didik. Fleksibilitas dalam bekerja dan mendapatkan upah sebelum lulus sebagai sarjana, tentunya menjadi magnet tersendiri. Kendati tetap memiliki tantangannya (misalnya, potensi over supply dari lulusannya), jurusan DKV masih dilirik sebagai sarana investasi masa depan yang menjanjikan. Masa depan yang menjanjikan umumnya dipahami dalam arti memberi kepastian mekanistik bagi keamanan ekonomis. Sampai pada titik ini, dapat dikatakan bahwa ekonomi hadir sebagai katalisator primer yang mendorong seseorang untuk memilih jurusan DKV.

Keyakinan tentang ekonomi sebagai katalisator tersebut semakin diperkokoh secara regulatif-institusional oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pada tanggal 20 Januari 2015, pemerintah membentuk BEKRAF atau Badan Ekonomi Kreatif yang bertugas untuk merumuskan, menetapkan, sinkronisasi, dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan di bidang ekonomi kreatif (Kumparan, 2024). DKV, dalam lingkup BEKRAF, diklasifikasikan sebagai salah satu subsektor kreatif (selain kuliner, mode atau fashion, kriya, arsitektur, musik, desain produk) yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi (Kemenparekraf, 2021). Kemenparekraf (2021) mencatat bahwa sampai pada tahun 2016, DKV sendiri telah menyumbang PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 579,3 miliar rupiah. Pencapaian tersebut jelas berkontribusi dalam menanamkan pandangan tentang pentingnya peran DKV bagi pertumbuhan ekonomi.

Dalam cakupan yang lebih luas, pandangan populer tersebut tidak hanya berlaku bagi DKV semata. Pelaziman pemahaman tentang kebernilaian pendidikan tinggi tidak terlepas dari manfaat ekonomisnya, juga turut berlaku bagi disiplin atau cabang ilmu lainnya. Terlebih lagi, tidak hanya dilazimkan, akan tetapi secara normatif direkomendasikan. Secara historis, rekomendasi normatif tersebut dilegitimasi secara regulatif oleh salah satu kebijakan yang disusun pemerintah bagi pendidikan tinggi. Salah satu kebijakan yang dimaksudkan tersebut adalah link and match (bertautan dan cocok). Kebijakan ini disusun dan mulai diterapkan pada tahun 1989 untuk membangun relasi langsung antara kompetensi para sarjana lulusan pendidikan tinggi sebagai tenaga kerja (bukan sebagai cendekiawan ataupun sebagai warga negara) dengan kebutuhan pasar yang diwakili oleh perusahaan bisnis serta industri (Precalya, 2022, p. 6581). Sasaran dari kebijakan ini sesungguhnya tidak hanya diperuntukan bagi tingkat pendidikan tinggi, namun juga turut mencakup tingkat sekolah menengah atas khususnya sekolah menengah kejuruan (Disas, 2018, p. 233).

Secara sosiologis, kebijakan link and match dilahirkan untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran para sarjana lulusan dari pendidikan tinggi (Disas, 2018, p. 232-233). Kebijakan ini turut menyiratkan pemahaman bahwa pengangguran, yang merupakan permasalahan sosial, adalah tanggung jawab pendidikan tinggi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggeser paradigma (atau model yang dianut) pendidikan tinggi dari supply minded menuju ke market demand minded. Pada intinya, kebijakan link and match disusun oleh

pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran para sarjana dengan mempertautkan kurikulum pendidikan tinggi dengan kepentingan perusahaan bisnis atau industri; untuk mengakomodasi kepentingan pasar. Kebijakan ini, pada gilirannya, mendapatkan pemuktahirannya melalui kebijakan MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka). Kebijakan ini disusun pada tahun 2020 (dituangkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) untuk memperkokoh jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dalam lingkup perusahaan bisnis dan industri (Kemendikbud, n.d.). Para mahasiswa/i peserta program ini dibebaskan untuk mengikuti perkuliahan dari program studi yang berbeda di kampus lain. Harapan dari program ini adalah peningkatan kompetensi dari para pesertanya. Peningkatan kompetensi yang dicapai melalui cara tersebut, pada gilirannya, akan membuka peluang lebih luas bagi para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan bisnis dan industri; demikian harapannya.

Relasi antara pendidikan tinggi dan industri tersebut kemudian dideklarasikan oleh pernyataan Presiden Joko Widodo pada tahun 2021. Beliau merekomendasikan agar universitas turut melibatkan pihak industri dalam mendidik para mahasiswa/i (Farisa & Galih, 2021). Para mahasiswa/i harus “difasilitasi untuk mampu bersaing di pasar kerja yang semakin terbuka dan terglobalisasi, harus mampu menjadi industriawan yang menciptakan lapangan kerja,” dan pada gilirannya mereka akan memiliki kemampuan untuk “meningkatkan status sosialnya, membuat dirinya naik kelas” (Farisa & Galih, 2021). Rekomendasi mendesak tersebut sesungguhnya semakin mengkristalisasi keyakinan masyarakat tentang peran pendidikan tinggi untuk melayani kepentingan pasar; untuk mengelevasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah krusial bagi kesejahteraan orang banyak, atau karenanya, seseorang menjadi mampu “meningkatkan status sosialnya.”

Pandangan umum tentang relasi antara pendidikan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi, termasuk antara jurusan DKV dengan sektor industri pada khususnya, mengandaikan setidaknya dua pandangan yang telah diterima begitu saja (taken for granted). Pertama, pendidikan dipahami secara reduktif sebagai tidak lebih dari sekadar investasi ekonomis. Kebernilaian sebuah disiplin atau cabang ilmu direkognisi sejauh manfaat ekonomis yang dihasilkannya. Rekognisi yang sedemikian rupa turut mempengaruhi bagaimana kita memahami aspek-aspek non-material yang secara krusial menopang sebuah disiplin atau cabang ilmu. Sebagai contohnya, kreativitas di dalam DKV adalah aspek non-material yang dalam konteks ekonomi kreatif, dikomodifikasi atau dibingkai sebagai komoditas. Komodifikasi kreativitas sendiri menunjuk pada sekumpulan proses atau aktivitas yang luarannya dapat dikomersialisasi (Suarez-Villa, 2009, p. 31). Proses atau aktivitas ini sesungguhnya merupakan cerminan dari bagaimana kepentingan bisnis dan industri menganeksasi otoritas akademik.

Kedua, kesejahteraan atau well-being dipahami hanya sebatas kemakmuran ekonomis. Peningkatan atau kenaikan kelas sosial seseorang (sebagaimana diutarakan oleh Presiden Joko Widodo) adalah salah satu dampak dari pencapaian ekonomis seseorang. Kekuatan daya beli yang ditopang oleh pendapatan dari apa

yang dikerjakan seseorang pada gilirannya mempengaruhi jenjangnya dalam hirarki kehidupan sosial. Apabila peningkatan pendapatan dan daya konsumtif tersebut ditempatkan sebagai sasaran praktis dari pendidikan, hal ini sama saja dengan mereduksi tujuan dari pendidikan sekaligus pemahaman tentang kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup dimengerti secara sempit sebatas kesejahteraan ekonomis. Pengertian yang reduktif tentang kesejahteraan hidup tersebut dipilari sekaligus memilari nalar kalkulatif yang rasional-ekonomistik. Nalar kalkulatif yang pada gilirannya mendominasi pengambilan keputusan dalam memilih disiplin atau cabang ilmu yang hendak digeluti: jurusan apa yang lebih menguntungkan dan kurang menguntungkan secara ekonomis. Jurusan, fakultas, dan universitas tidak lagi dimengerti dalam posisinya sebagai situs sentral untuk merawat tegangan antara kepentingan pasar dengan kepentingan warga negara (yang mungkin tidak terukur secara komersial namun krusial bagi demokrasi) (Giroux, 2002, p. 105). Gagasan-gagasan ideal terkait pengejaran pengetahuan, keunggulan ilmu pengetahuan, pendewasaan manusia sebagai pribadi dan warga negara, tidak lagi diaspirasikan dan justru dipencilkan. Cara berada universitas menjadi tidak jauh berbeda dengan lembaga manufaktur tenaga kerja untuk mewakili kepentingan pasar.

Penalaran kalkulatif-ekonomistik ini sesungguhnya tidak hanya berlaku eksklusif untuk memilih jurusan tertentu pada aras pendidikan tinggi, akan tetapi menjadi cara menalar yang dominan dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari. Michael J. Sandel, dalam bukunya yang berjudul *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets* (2012), menunjukkan bagaimana ekonomi pasar telah menjadi jendela utama untuk memandang kehidupan masa kini. Pada bagian awal bab introduksinya, beliau memaparkan sekurang-kurangnya 15 aspek kehidupan yang tidak terlepas dari kekuasaan mekanisme pasar (Sandel, 2012, pp. 3-5). Dari penyewaan rahim ibu pengganti (*surrogate mother*), penyewaan anggota tubuh tertentu sebagai media periklanan, pemberian insentif bagi siswa/i SD yang berhasil membaca sebuah buku dalam rentang waktu tertentu, dan pastinya termasuk penjualan admisi ke universitas ternama. Beliau menyatakan bahwa "Kita hidup di masa ketika hampir segala sesuatu dapat diperjualbelikan. Selama tiga dekade terakhir, pasar—dan nilai-nilai pasar—telah mendominasi kehidupan kita dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya" (Sandel, 2012, p. 5). Ia lebih lanjut menegaskan bahwa "Nilai-nilai pasar semakin memainkan peran yang semakin besar dalam kehidupan sosial. Ekonomi menjadi sebuah kekaisaran tersendiri. Saat ini, nalar jual beli tidak berlaku hanya bagi barang-barang material saja akan tetapi semakin mengatur seluruh dimensi kehidupan" (Sandel, 2012, p. 6). Kreativitas, imajinasi, kebebasan artistik yang krusial di dalam jurusan DKV adalah aspek-aspek non-material dari kehidupan yang turut dilumat oleh imperialisme pasar tersebut.

Situasi kehidupan eksisting yang dideskripsikan oleh Sandel di atas tidak hanya terawat oleh kesepakatan politis pemerintah dalam mengatakan "ya" bagi mekanisme pasar untuk menggerayangi setiap sendi kehidupan. Peng-iya-an tersebut tentunya turut dilandasi oleh dan merupakan ungkapan dari keyakinan moral tertentu tentang "yang baik" atau "yang seharusnya." Keyakinan moral yang sesungguhnya

memburamkan pandangan kita dari praktik imperialistik pasar. Keyakinan tersebut dicerminkan oleh salah satu teori etika normatif yang berkelindan dengan perspektif ekonomi. Teori etika normatif yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Utilitarisme, khususnya dari perspektif William Stanley Jevons (1835-1882). Jevons sendiri adalah salah seorang ahli logikawan dan ekonom asal Inggris yang pemikirannya tentang ekonomi berkelindan dengan Utilitarisme. Pemikirannya tersebut pada gilirannya hadir sebagai kerangka normatif dalam menyikapi berbagai dimensi kehidupan, termasuk menjadi landasan etis untuk menilai pendidikan tinggi.

METODOLOGI

Artikel ini ditulis dengan menerapkan metode studi pustaka atau kajian literatur (literature review). Metode ini diterapkan untuk menganalisis temuan-temuan terdahulu terkait pemikiran William Stanley Jevons tentang Utilitarisme, ekonomi, dan pendidikan. Analisis juga turut diarahkan ke aneka fakta empiris yang menyinari gejala peningkatan minat masyarakat terhadap jurusan DKV di dalam lingkup pendidikan tinggi. Studi pustaka dijalankan secara sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan membangun sintesa dari sumber-sumber pustaka yang kredibel untuk mencapai tujuan penulisan. Sumber pustaka yang dipilih untuk dianalisis dan disintesis adalah buku, artikel jurnal akademik, dan beberapa situs daring milik pemerintah serta organisasi institusional terpercaya. Pencarian sumber pustaka tersebut difokuskan oleh kata-kata kunci yang digunakan seperti “utilitarisme,” “ekonomi,” “pendidikan,” “Jevons,” “DKV,” dan “universitas.” Analisis terhadap sumber pustaka dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola serta pengandaian-pengandaian di dalamnya. Sintesis diarahkan ke pembahasan perspektif multidisiplin terkait relevansi pemikiran utilitarian Jevons tentang kesejahteraan ekonomi dan pendidikan dengan pandangan stereotip masyarakat tentang jurusan DKV.

PEMBAHASAN

Pemaparan tentang relasi antara eskalasi jumlah jurusan DKV dengan kepentingan industri atau demi pertumbuhan ekonomi di tataran gejala, telah mengokupasi isi tulisan dalam bagian Pendahuluan. Isi tulisan dalam bagian ini akan berupaya untuk menyoroti pandangan teoritis-filosofis tertentu yang sesungguhnya merekomendasikan cara berpikir serta bertindak di dalam gejala tersebut. Pandangan teoritis-filosofis, yang mungkin tanpa kita sadari, melumrahkan pemberlakuan kebermanfaatan ekonomis untuk memahami kebernilaian sebuah disiplin ataupun cabang ilmu tertentu. Teori yang dimaksudkan merupakan salah satu teori dalam bidang etika, yakni Utilitarisme; khususnya Utilitarisme yang berkelindan dengan ekonomi.

Dalam semangat utilitarian reformisme-nya, Jevons turut menekankan pentingnya pendidikan vokasional sebagai kunci untuk mendorong kesejahteraan tenaga kerja. Dalam "Methods of Social Reform" (1883), ia menulis bahwa "pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan industri. Akan tiba saatnya pendidikan yang murni literatural tidak lagi cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya." (Jevons, 1883, p. 241).

Pernyataan ini menandakan bahwa Jevons mendorong penguatan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri—sebuah orientasi yang kini dihidupkan kembali dalam bentuk kebijakan "link and match" serta program MBKM. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi cenderung diarahkan menjadi industrial matching apparatus, bukan lagi ruang otonom pengembangan ilmu. Jevons tidak menolak relevansi industri dalam pendidikan, namun ia menekankan bahwa manfaatnya harus berkelanjutan (durasi panjang) dan mendorong kemandirian ekonomi. Sayangnya, dalam situasi sekarang, upaya ini kerap jatuh pada pendekatan pragmatis sempit yang menyamakan keberhasilan pendidikan dengan seberapa cepat lulusan terserap pasar kerja.

Gejala maraknya peminatan pada jurusan DKV juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi media dan ketersediaan alat desain digital yang semakin demokratis. Media sosial, desain antarmuka, dan konten visual kini menjadi tulang punggung komunikasi di berbagai sektor, dari bisnis, pendidikan, hingga pemerintahan. Sebagaimana disampaikan oleh Manovich (2013), "meningkatnya budaya visual dalam media digital telah menyebabkan meningkatnya permintaan akan tenaga profesional yang terampil dalam penarasian dan desain visual." (p. 215). Tidak hanya kebutuhan pasar yang meningkat, tetapi pula kemudahan mengakses teknologi desain—seperti Canva, Adobe Suite, hingga Procreate—telah membuka jalan bagi calon mahasiswa untuk mengeksplorasi minat mereka lebih dini. Fenomena ini mendorong tumbuhnya minat pada DKV karena calon mahasiswa merasa sudah memiliki pra-kedekatan dengan dunia yang akan mereka geluti. Richard Florida juga turut menyoroti bagaimana teknologi memungkinkan entry-level democratization dalam ekonomi kreatif. Beliau mengemukakan bahwa "Inovasi teknologi telah menurunkan hambatan masuk ke produksi kreatif, sehingga lebih banyak siswa yang mempertimbangkan karier di bidang komunikasi visual." (Florida, 2002, p. 105). Dengan demikian, pilihan terhadap DKV turut didukung oleh demokratisasi teknologi digital. Hal ini membuat pendekatan Jevons tentang pendidikan vokasional semakin relevan: pendidikan harus menyesuaikan diri tidak hanya dengan kebutuhan industri, tetapi juga dengan lanskap perkembangan teknologi yang turut membingkai perspektif dan aspirasi generasi muda.

Perkembangan media digital dan kemudahan akses terhadap perangkat lunak desain tidak hanya mendorong minat terhadap jurusan DKV, tetapi juga melahirkan cabang-cabang peminatan baru di dalamnya yang pada gilirannya berdiri sebagai jurusan tersendiri. Gejala ini terlihat, misalnya, pada bidang animasi, game art, fotografi, dan multimedia yang semula berada di dalam naungan DKV, namun kini mulai berkembang sebagai program studi mandiri di banyak institusi pendidikan tinggi (Rizki, 2023, p. 48). Gejala ini memperlihatkan bahwa ranah DKV mengalami perluasan

cakupan keilmuan seiring dengan kompleksitas media komunikasi visual yang digunakan di era digital.

Perluasan tersebut beriringan dengan ekosistem digital yang terus bertumbuh, di mana keahlian khusus seperti animasi 3D, sinematografi digital, dan desain UX/UI menjadi kebutuhan utama dalam industri kreatif kontemporer (Setiawan, 2020, p. 97). Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya mewadahi ekspresi kreatif, tetapi juga merekonfigurasi struktur pendidikan tinggi itu sendiri. Pemekaran jurusan-jurusan dari rahim DKV tersebut mencerminkan adaptivitas institusi pendidikan tinggi terhadap gerak laju industrialisasi konten visual-digital yang semakin pesat. Keterbukaan untuk berperilaku adaptif ini tidak terlepas dari pertimbangan akan kebermanfaatannya, yakni bagi industri konten visual-digital. Secara mendasar, keputusan untuk beradaptasi tersebut diambil dengan berlandaskan pemahaman 'yang baik adalah yang bermanfaat.' Sebuah pemahaman yang tidak bisa tidak, inheren dalam Utilitarisme.

Utilitarisme sendiri merupakan salah satu teori etika yang tercakup ke dalam klasifikasi teori etika yang lebih umum, yakni Konsekuensialisme. Fokus dan bobot dari Konsekuensialisme mengarah pada tujuan akhir yang bermanfaat atau bernilai positif secara umum bagi, misalnya, kesejahteraan manusia dan hewan (Boone, 2017, p. 57). Pada pokoknya, Konsekuensialisme menekankan bahwa penilaian etis tentang baik-buruknya tindakan seseorang ataupun peraturan tertentu, tidak terlepas dari konsekuensinya. Dalam kerangka teoritis Utilitarisme, konsekuensi tersebut menunjuk ke kebahagiaan (Boone, 2017, p. 63) atau kerap juga dicakup oleh kosa kata lain yang lebih luas, yakni kebaikan (Driver, 2014).

Kendati cukup kompleks dan tidak dapat diremehkan dalam memahaminya, Utilitarisme merupakan salah satu teori etika dalam cakupan Konsekuensialisme yang paling dominan berlaku dalam kehidupan sehari-hari (Boone, 2017, p. 63). Driver (2014) sendiri menyatakan bahwa Utilitarisme adalah salah satu teori normatif yang paling kuat dan memikat di dalam sejarah pemikiran filosofis (Driver, 2014). Daya pikat tersebut sesungguhnya terkandung di dalam pengertian definitifnya. Secara definitif, Utilitarisme dapat dipahami sebagai aliran atau sebuah pandangan teoritis dalam filsafat moral yang menekankan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai prinsip moral yang paling dasariah (Sudarminta, 2013, p. 127). Pandangan ini menekankan bahwa penilaian akan benar-salah serta baik-buruknya sebuah perbuatan secara moral bergantung pada jawaban dari pertanyaan: Apakah luaran dari perbuatan tersebut adalah kebaikan terbesar dari kebanyakan orang? Apabila "ya" adalah jawabannya, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan secara moral. Singkatnya, basis pengukuran bagi benar-salah serta baik-buruknya sebuah perbuatan secara moral adalah *greatest happiness of the greatest number* atau kebahagiaan terbesar dari kebanyakan orang (Boone, 2017, p. 64).

Penekanan terhadap kesejahteraan, kebahagiaan, sebagai luaran atau konsekuensi dari sebuah tindakan inilah yang menjadikan teori ini sungguh persuasif dan memikat. Adalah bagian dari akal sehat (*common sense*) masyarakat awam untuk

menempatkan kesejahteraan, kebahagiaan, sebagai kualitas-kualitas kehidupan yang diaspirasikannya. Pengejaran kebahagiaan, kesejahteraan, dan bentuk kebaikan lainnya tidak hanya lazim dilakukan, namun juga merupakan obligasi moral (Boone, 2017, p. 63). In short, the pursuit of happiness is indeed a moral obligation.

Dalam jenisnya, Utilitarisme dapat dipahami melalui dua klasifikasi, yakni Utilitarisme Tindakan dan Utilitarisme Peraturan. Utilitarisme Tindakan dapat dirumuskan melalui kaidah berikut: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga setiap tindakanmu itu menghasilkan akibat-akibat baik yang lebih besar di dunia dari pada akibat buruknya (Sudarminta 2013, 130). Utilitarisme dalam klasifikasi ini memiliki kecondongan untuk bersikap permisif terhadap pengabaian peraturan yang ada sejauh kebaikan terbesar dari kebanyakan orang dapat terwujud. Apabila kaidah prinsipil ini diberlakukan secara konsisten, masalah yang mungkin muncul adalah sikap kompromistis terhadap pelanggaran hukum dan ketidakadilan. Utilitarisme Peraturan, pada sisi yang berbeda, dikembangkan untuk mengatasi permasalahan yang dimunculkan oleh Utilitarisme Tindakan. Klasifikasi kedua ini memiliki kaidah prinsipil yang berbunyi: Bertindaklah sesuai dengan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang penerapannya menghasilkan akibat baik yang lebih besar di dunia ini dari pada akibat buruknya (Sudarminta 2013, 131). Ungkapan politis-regulatif dari klasifikasi kedua dari Utilitarisme ini sesungguhnya dapat dieksplifikasi oleh kebijakan-kebijakan ekonomi kreatif, link & match, serta MBKM yang telah disinggung di dalam bagian Pendahuluan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan regulatif tersebut disusun dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat besar bagi, baik kebanyakan desainer Komunikasi Visual, maupun para sarjana lulusan universitas pada umumnya.

Kendati kedua klasifikasi tersebut menawarkan penekanan yang berbeda, namun keduanya sepakat bahwa kebahagiaan maksimal bagi orang banyak tetap harus ditempatkan sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan moral (Tännsjö, 2002, p. 21). Upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan bagi banyak orang sekaligus menggaris-bawahi karakter distingtif dari Utilitarisme, yakni yakni imparsialitas dan pertimbangan objektif dari pelaku (Driver, 2014). Artinya, kebahagiaan dari setiap orang diyakini sama dan setara. Kebahagiaan diriku tidak lebih berarti dibandingkan kebahagiaan orang lain. Lebih jauh lagi, keharusan bagi diriku untuk mempromosikan kebahagiaan secara menyeluruh tidak berbeda dengan keharusan orang lain dalam mempromosikan kebahagiaan tersebut. Singkatnya, kebahagiaan yang disasar dalam kerangka Utilitarisme adalah kebahagiaan yang objektif dan terukur. Penalaran kalkulatif subjek etis pengambil keputusan dibutuhkan agar maksimalisasi kebahagiaan dapat terwujud sebagai konsekuensi dari sebuah tindakan ataupun regulasi yang disusun. Meskipun demikian, arti dari kebahagiaan sendiri masih dapat dipahami secara lebih spesifik. Spesifikasi arti dari kebahagiaan dalam Utilitarisme ini dapat ditemui jejak historisnya dalam pemikiran dua filosof asal Inggris, yakni Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873).

Pemikiran filosofis tentang kebahagiaan dari kedua tokoh utilitarian tersebut layak disinggung dalam artikel ini karena relevansinya dengan pandangan Jevons. Bentham dan Mill sekata mengenai konsep kebahagiaan. Kosa kata spesifik yang dirujuk oleh

kedua filosof Utilitarisme klasik tersebut untuk mengidentifikasi kebahagiaan adalah “kenikmatan” atau pleasure (Driver, 2014). Kendati keduanya sepakat untuk menempatkan kebahagiaan identik dengan kenikmatan, Bentham dan Mill memiliki pandangan yang berbeda tentangnya. Perbedaannya terletak pada kecenderungan pandangan dari keduanya tentang kebahagiaan yang diidentikkan dengan kenikmatan. Pandangan Utilitarisme Bentham memiliki kecenderungannya yang hedonistik, sebuah kecenderungan yang hendak dihindari oleh Mill (Boone, 2017, 67-68).

Tesis sentral pandangan utilitarian dari Bentham adalah bahwa sebuah keputusan dapat dinilai bermoral apabila konsekuensi dari keputusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan (utility) (Boone, 2017, 64). Konsekuensi dari keputusan tersebut dapat dikatakan bermanfaat, apabila kebahagiaan atau kenikmatan diperoleh secara maksimal sedangkan rasa sakit (pain) terhindarkan. Gagasan pokok dari etikanya tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari pandangan sosio-antropologisnya tentang manusia. Manusia, dari perspektifnya, adalah salah satu pengada (a living being) yang selalu mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Kenikmatan dan rasa sakit sudah selalu “mengatur kita dalam segala hal yang kita lakukan, dalam segala hal yang kita ucapkan,” dan “dalam segala hal yang kita pikirkan” (Bentham, 1907, p. 1). Beliau berargumentasi bahwa manusia sudah selalu mengabdikan kepada dua “tuan” yang berdaulat atas hidupnya, yakni rasa nikmat dan rasa sakit (pleasure and pain); dan pengabdian ini merupakan sesuatu yang kodrati dari keberadaannya. Berpijak pada pandangannya tentang kodrat manusia tersebut, pengejaran akan rasa nikmat serta penghindaran nelangsa adalah aktivitas yang alamiah dari manusia (baik sebagai individu maupun anggota masyarakat) dan karenanya baik (secara moral) untuk terus dilakukan; it is a moral obligation to do so. Gagasan naturalistiknya tentang kodrat manusia (the nature of human being) diselaraskan dengan rekomendasi etisnya.

Sebagai bagian dari upayanya untuk merealisasikan secara praktis pandangan utilitariannya tersebut, Bentham mengajukan seperangkat alat ukur kategorial pendukung. Perangkat ini berisi beberapa kategori sebagai alat ukur bagi pertimbangan moral. Artinya, kategori-kategori yang disusun akan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apakah sebuah tindakan atau keputusan moral tertentu sungguh berujung pada konsekuensi yang diharapkan, yakni maksimalisasi kenikmatan dan minimalnya rasa sakit. Kategori-kategori tersebut adalah intensitas, durasi, kepastian, proksimitas, kesuburan, kemurnian, dan ekstensi (Boone, 2017, p. 66). Katakanlah Bentham merumuskan sebuah perangkat algoritmik untuk etika. Berikut adalah penjelasan singkat beserta contohnya yang berkaitan dengan dinamika dalam lingkup jurusan DKV:

Intensitas menunjuk ke kekuatan atau kelemahan dari rasa nikmat yang muncul dari sebuah pengambilan keputusan. Sebagai contohnya: Didukung oleh fleksibilitas serta ragam pekerjaannya, kebahagiaan seseorang yang mengambil keputusan untuk memilih jurusan DKV dapat lebih intens atau kuat dibandingkan memilih jurusan lain yang kurang populer.

Durasi adalah kategori yang berkenaan dengan jangka waktu dari rasa nikmat atau kebahagiaan yang dialami. Sebagai contohnya: Keputusan pemerintah, melalui Kemenparekraf atau BEKRAF, dalam menempatkan DKV ke dalam sub-sektor ekonomi merupakan bentuk dukungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungannya. Penempatan ini berpotensi memberi jaminan lebih besar bagi para pemilih jurusan DKV untuk bekerja dan mendapatkan manfaat darinya secara lebih lama, dalam komparasinya dengan jurusan lain yang tidak dirangkul secara regulatif-institusional.

Kepastian merupakan kategori kebahagiaan utilitarian Bentham yang cukup jelas dengan sendirinya. Kategori ini berkenaan dengan keterjaminan dalam mendapatkan kebahagiaan sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan. Sebagai contohnya: Intervensi pemerintah untuk mengembangkan profesi desainer Komunikasi Visual melalui BEKRAF lebih menjanjikan kepastian masa depan yang sejahtera. Sekalipun kepastian tersebut masih berstatus peluang, hal ini jelas berkontribusi bagi eskalasi minat para lulusan SMU ataupun SMK untuk mempelajarinya.

Proksimitas, berkenaan dengan seberapa dekat sebuah manfaat akan dialami setelah keputusan tertentu diambil. Sebagai contohnya: Seorang mahasiswa/i jurusan DKV berpeluang untuk mendapatkan penghasilan sebagai desainer lepas meskipun ia belum menjadi sarjana. Dari perspektif kategorial ini, keputusan untuk menjadi mahasiswa/i DKV adalah lebih bermoral dari pada, misalnya, memilih untuk menjadi mahasiswa/i jurusan kedokteran. Seorang yang telah memperoleh gelar sarjana Kedokteran masih harus menjalankan beberapa tahap prosedural selama beberapa tahun seperti program profesi, kerja praktek kedokteran, dan ujian profesi. Tahapan tersebut harus dilalui seorang sarjana Kedokteran agar ia memperoleh izin praktik dan pada akhirnya mendapatkan penghasilan sebagai dokter.

Kesuburan bagi kebahagiaan untuk bertumbuh menjadi kategori selanjutnya yang patut diperhitungkan. Contohnya, dengan kehadiran BEKRAF, keputusan untuk membuka program studi DKV di universitas tertentu berpotensi lebih menyuburkan pertumbuhan ekonomis dari pada, misalnya membuka jurusan-jurusan yang sepi peminat seperti Arkeologi, Kearsipan, Kehutanan, dan sebagainya (CNN, 2024). Jurusan-jurusan yang sesungguhnya penting bagi kehidupan (sosio-kultural, ekologis) akan tetapi luaran pengetahuannya tidak dapat secara langsung dikomodifikasi.

Kemurnian adalah kategori yang hendak memeriksa ketulenan atau kesejatan dari rasa nikmat ataupun rasa sakit yang diperoleh sebagai sebuah konsekuensi dari aksi pengambilan keputusan tertentu. Sebagai contoh praktis: Seorang desainer Komunikasi Visual ditawarkan untuk mengerjakan sebuah proyek desain dengan bayaran yang fantastis namun kesehatan serta waktu berharganya dengan keluarga akan dikorbankan. Dalam situasi tersebut, ia harus mampu memprediksi apakah kenikmatan sejati yang akan diperoleh atau justru penderitaan tulen.

Ekstensi, sebagai bingkai kategorial terakhir, menyoroti jumlah orang yang turut memperoleh manfaat sebagai dampak dari sebuah keputusan. Hal ini dapat

dicontohkan oleh dampak dari keputusan BEKRAF untuk mengklasifikasikan DKV sebagai subsektor ekonomi kreatif. Keputusan tersebut mempengaruhi banyak individu yang bekerja di bidang pendidikan tinggi, pendidikan menengah kejuruan, perancangan aplikasi digital, periklanan, dan lain sebagainya.

Bertolak dari kriteria atau kategori pertimbangan etis Benthamian yang telah disampaikan, kendati memikat, pengambilan keputusan moral tidaklah semudah yang kita kira. Banyak waktu akan dibutuhkan untuk memantau semua kategori di atas. Bentham sendiri tidak menyarankan untuk memasukkannya ke dalam setiap tindakan penilaian moral karena pertimbangan efisiensi (Driver, 2014). Menurutnya, dengan seiring waktu dan pengalaman, seseorang pada akhirnya dapat terlatih untuk mengambil keputusan moral secara lebih efisien.

Mill, sebagai salah satu tokoh utilitarian, sepakat dengan Bentham bahwa kenikmatan maksimal dan nelangsa yang minimal harus menjadi konsekuensi dari sebuah keputusan apabila keputusan tersebut hendak dinilai bermoral. Meskipun demikian, Mill memiliki pandangan yang berbeda. Perbedaan pandangan ini hadir sebagai dua tanggapan kritis terhadap Utilitarisme dari Bentham. Pertama, dari perspektif Mill, rasa nikmat dan nelangsa adalah dimensi kualitatif dari kehidupan manusia yang sulit dikuantifikasi atau diukur secara objektif (Boone, 2017, p. 67). Sekalipun Bentham telah menyediakan perangkat kategorial sebagai alat ukur, kenikmatan dan nelangsa sudah selalu berciri subjektif atau relatif terhadap subjek yang mengalaminya.

Kedua, Mill berpendapat bahwa pemahaman Bentham tentang kenikmatan dan nelangsa terlampaui egaliter (Boone, 2017, p. 67-68). Artinya, kenikmatan-kenikmatan inderawi dan sensasionalistik dipandang setara dengan kenikmatan yang lebih kompleks. Sebagai contohnya: Berpijak pada kategori proksimitas, kenikmatan dari membangun sebuah citra visual dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) disetarakan dengan kenikmatan merancang melalui tahap sketsa tangan. Secara mendasar, Mill berargumentasi bahwa kenikmatan adalah dimensi kualitatif manusia yang seharusnya dipahami secara hierarkis. Ada beberapa rasa nikmat yang lebih hebat dibandingkan yang lain, misalnya kenikmatan intelektual dan spiritual. Apabila pencapaian intelektual dan spiritual tidak dipandang sebagai sebuah bentuk kenikmatan, manusia hanya akan membatasi dirinya dengan kenikmatan duniawi atau, apa yang disebut Mill sebagai sensasi belaka (Boone, 2017, p. 68).

Kenikmatan, sebagaimana berlaku dalam pandangan Bentham, adalah sebuah tujuan yang pada dirinya sendiri layak untuk dikejar karena secara intrinsik: bernilai. Kendati demikian, kenikmatan tidak harus muncul dari tindakan yang bermoral atau menjadi basis utama untuk melakukan sesuatu. Mill menegaskan, sebagaimana ditulis oleh Boone, bahwa tidak hanya kenikmatan bernilai moral pada dirinya sendiri, namun sekaligus moralitas itu sendiri adalah sebuah kenikmatan (Boone, 2017, p. 69). Sebuah aksi atau tindakan yang bermoral akan berujung pada kenikmatan. Konsisten dengannya, kenikmatan yang muncul dari aksi atau tindakan tersebut adalah kenikmatan moral atau berciri etis. Kenikmatan moral adalah kenikmatan yang berciri kultural, intelektual, estetsis, religius, dan tidak terbatas pada kenikmatan “rendah” di

tataran sensasi. Bagi Mill, adalah “lebih baik menjadi manusia yang tidak terpuaskan dari pada menjadi babi yang puas,” atau “lebih baik menjadi Sokrates yang kecewa daripada orang bodoh yang bahagia” (Mill, 2003, p. 188). Pemahaman ini sesungguhnya dapat diterapkan pada berbagai aktivitas seperti studi akademik, religi, ataupun etika. Aktivitas-aktivitas non-sensasional yang akan membahagiakan secara moral ketika dijalankan.

Tanpa menafikan perbedaan pandangan dari keduanya, baik Bentham dan Mill tetap sepakat untuk menempatkan kenikmatan sebagai orbit dari etika Utilitarisme. Bagaimana gagasan orbital tersebut berkelindan dengan ekonomi dan dipengaruhi oleh pendidikan, ditemukan dalam konstelasi pemikiran William Stanley Jevons. Greatest happiness of the greatest number tetap menjadi semboyan prinsipil dalam pemikirannya. Beliau berikhtiar untuk memperlakukan ekonomi sebagai sebuah kalkulasi rasa nikmat dan rasa sakit (Vaggi & Groenewegen, 2003, p. 204). Ikhtiar konseptualnya untuk memintal Utilitarisme, ekonomi, dan juga pendidikan dilatari oleh observasinya terhadap situasi konkret kehidupan masyarakat. Observasinya menunjukkan bahwa masyarakat sudah selalu hidup “dengan berbagai kebutuhan dan kekuatan produksi,” serta “di kepemilikan tanah tertentu dan sumber material lainnya,” karenanya cara tertentu dibutuhkan untuk “mempekerjakan tenaga mereka agar dapat memaksimalkan utilitas produk” (Jevons, 1911, p. 267). Situasi ini sesungguhnya merupakan bagian dari situasi konkret masa kini yang layak menjadi keprihatinan kita. Secara spesifik dalam kaitannya dengan menjamurnya jurusan DKV, keseimbangan antara pertumbuhan jumlah penduduk (yang sebagiannya adalah sarjana DKV) beserta ragam kebutuhannya dengan lahan pekerjaan yang dapat memaksimalkan utilitas dari luarannya, jelas harus diaspirasikan.

Dari perspektif Jevons, apabila situasi yang ia observasi tersebut tidak diberi perhatian yang seharusnya, kemiskinan massal yang disertai dengan perilaku buruk (vice) dan sikap tidak acuh (ignorance), berpotensi lahir sebagai konsekuensi (Peart, 1990, p. 288). Kemiskinan massal beserta konsekuensinya tersebut sesungguhnya memang menjadi permasalahan pokok yang hendak diatasi oleh Jevons melalui Utilitarisme. Pandangan utilitariannya sendiri harus dimengerti dalam konteks program reformasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para tenaga kerja (Peart, 1990, p. 288). Program reformasi sosial yang dimaksudkan menunjuk ke kebijakan-kebijakan yang dirancang untuk menggalakkan improvisasi dari para pekerja, termasuk juga calon tenaga kerja. Improvisasi meliputi kemandirian intelektual, moral, dan tentunya, ekonomi (Peart, 1990, p. 284). Kemandirian ketiga dimensi kemanusiaan tersebut harus ditempatkan sebagai bidikan bagi beragam kebijakan yang dirancang. Agar kebijakan-kebijakan yang dirancang mampu mengenai bidikannya, opini publik harus dilibatkan dalam perancangannya alih-alih diberlakukan secara paksa oleh negara atau badan legislasi.

Beliau menegaskan bahwa “tidak ada prinsip abstrak, dan tidak ada aturan mutlak, yang dapat memandu kita dalam menentukan jenis perusahaan industri apa yang harus digerakkan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh negara...hanya pengalaman dan argumentasi yang dapat menentukan apakah masyarakat akan

mendapat manfaat terbaik melalui tindakan kolektif negara, atau dengan cara mengandalkan kepentingan pribadi” (Jevons, 1883, p. 278). Tidak hanya opini publik yang harus dipertimbangkan, namun perspektif bisnis dan industri juga harus turut dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Pandangan ini disiratkan Jevons dengan nuansa yang lebih optimistik. Baginya, penyelenggaraan kebijakan oleh negara memang penting, akan tetapi dengan melibatkan perspektif “perusahaan komersial swasta,” para pekerja dapat “memiliki keuntungan yang lebih tidak diragukan lagi” (Jevons, 1883, p. 278). Pernyataan ini sesungguhnya merekomendasikan negara, khususnya badan legislatif, untuk membuka ruang bagi kompromi dalam penyusunan kebijakannya. Kompromi, bagi Jevons, adalah “inti dari perubahan legislatif, dan ketika masyarakat menjadi lebih beragam dan rumit, kompromi menjadi semakin diperlukan” (Jevons, 1883, p. 247). Sederhananya, libatkanlah pihak lain di luar institusi negara, termasuk swasta, dalam penyusunan kebijakan reformasi sosial. Optimisme Jevons sendiri terhadap peran perusahaan komersial swasta dalam memaksimalkan manfaat ekonomis, tidak terlepas dari gagasan Jevons tentang kenikmatan dalam Utilitarismenya.

Gagasan konseptual Jevons sendiri tentang kenikmatan atau kebahagiaan turut dipengaruhi oleh pemikiran dari Mill dan Bentham. Jevons tidak menerima sepenuhnya pemikiran Mill tentang hirarki kenikmatan dan tidak menolak semua algoritma etika utilitarian dari Bentham. Beliau sepakat dengan Mill bahwa kenikmatan dapat dipahami secara hirarkis, akan tetapi tingkatannya dapat diukur melalui kategori-kategori algoritmik dari Bentham (Peart, 1990, p. 287). Dari sejumlah kategori pengukur kebahagiaan dari Bentham, Jevons mengutamakan satu kategori dibandingkan lainnya. Kategori tersebut adalah durasi (Peart, 1990, p. 287). Durasi diutamakan dalam kerangka penyusunan kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan. Kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan lebih lama, niscaya jauh lebih penting daripada intens namun singkat. Kebijakan yang dapat memaksimalkan kebahagiaan secara misalnya, intens namun singkat, tidak akan mencukupi bagi sebuah program reformasi sosial. Lalu, apa yang dimaksudkan secara spesifik oleh Jevons sendiri dengan kebahagiaan? Kesejahteraan ekonomis adalah jawabannya.

Sebagai seorang utilitarian, gagasannya tentang kebahagiaan didasarkan seluruhnya pada kalkulasi rasa nikmat dan rasa sakit. Bagaimana hal ini berkaitan dengan ekonomi, menurut Jevons, terletak pada tujuan dari ekonomi itu sendiri. Jevons menempatkan “tujuan dari ilmu Ekonomi adalah memaksimalkan kebahagiaan dengan membeli kenikmatan,” dan “dengan harga terendah dari penderitaan” (Jevon, 1911, p. 23). Beliau menempatkan upaya untuk memaksimalkan kebahagiaan sebagai sebuah persoalan ekonomi. “Membeli kenikmatan” menunjuk ke membeli dan memiliki komoditas. Komoditas sendiri, menurut Jevons, dapat dimengerti sebagai “objek, substansi, tindakan, atau layanan apapun, yang dapat memberikan kenikmatan atau menghilangkan rasa sakit” (Jevon, 1911, p. 23). Singkatnya, komoditas adalah segala sesuatu yang berkualitas atau bermanfaat (memiliki utilitas) dalam melayani manusia. Sehubungan dengan daya seseorang untuk membeli (to purchase) komoditas, yang

merupakan jelmaan konkret dari kenikmatan itu sendiri, dimungkinkan oleh kemampuannya untuk bersikap bijak dalam mengelola keuangannya. Sikap bijak ini tidak terlepas dan dapat dibina melalui pendidikan. Pada titik ini, kita bersentuhan dengan pandangan Jevons akan krusialnya pendidikan bagi kesejahteraan ekonomi.

Jevons berargumentasi bahwa “hanya dengan peningkatan pendidikan dan pengendalian diri,” maka upah yang diperoleh seorang pekerja akan berujung pada kemapanan hidup (Jevons, 1883, p. 209). “Kemapanan hidup” yang dimaksudkan adalah kesejahteraan ekonomis yang bertahan lama atau berdurasi panjang. Secara praktis, Jevons menyerukan tentang pentingnya pendidikan untuk memastikan bahwa keputusan untuk menabung secara tepat dapat diambil (Peart, 1996, p. 7). Istilah “tepat” dimengerti sebagai proporsional atau relevan dengan kebutuhan dari jumlah anggota keluarga yang ada. Jevons meyakini bahwa dalam konteks pengambilan keputusan antar waktu dan situasi, pendidikan niscaya dibutuhkan agar pelaku yang berkepentingan diri mampu mengambil keputusan ekonomi yang benar (Peart, 1996, p. 63). Dari perspektifnya, pendidikan merupakan kunci utama bagi pengentasan kemiskinan di kalangan kelas pekerja. Melalui pendidikan, para pekerja dapat ditingkatkan pengendalian dirinya dan tabungannya. Gagasannya tentang krusialnya pendidikan bagi kemandirian ekonomi dari kaum kelas pekerja, mendorong Jevons untuk menyerukan ketersediaannya secara publik. Sebagai contohnya, ia merekomendasikan ketersediaan perpustakaan umum yang dapat diakses oleh semua orang, khususnya para pekerja (Peart, 1996, p. 293). Bagi Jevons, perpustakaan umum merupakan salah satu sarana (dengan biaya rendah) publik yang dapat memperluas pendidikan bagi para pekerja.

Pada pokoknya, pandangan utilitarian Jevons menempatkan pendidikan sebagai sebuah prasyarat kunci bagi pengambilan keputusan yang berujung pada *greatest happiness of the greatest number*; di mana “happiness” dimengerti secara reduktif sebagai kesejahteraan ekonomi. Pandangan utilitarian-ekonomi ini juga yang sekiranya diandaikan oleh masyarakat masa kini untuk memahami secara umum jurusan-jurusan di dalam lingkup pendidikan tinggi. Kendati pemahaman tersebut telah diyakini sebagai sebuah kewajaran atau *common sense*, tidak berarti bahwa pemahaman tersebut imun dari permasalahan. Ada sekurang-kurangnya tiga permasalahan yang diimplikasikan olehnya, yakni permasalahan etis, antropologis, dan politis.

Permasalahan etis berkenaan dengan pandangan normatif tentang nilai dari pendidikan yang terletak pada utilitas atau dampaknya bagi kesejahteraan ekonomis. Sekilas tidak ada masalah dengan pandangan ini, namun sesungguhnya memiskinkan arti dari aktivitas belajar itu sendiri. Aktivitas belajar menjadi surut nilainya apabila tidak diimingi oleh insentif ekonomisnya. Dorongan untuk belajar tidak lagi berciri intrinsik atau baik pada dirinya sendiri, namun berciri ekstrinsik. Berciri ekstrinsik artinya bahwa kebaikan dari aktivitas belajar ditentukan oleh hal-hal di luar aktivitas belajar itu sendiri.

Permasalahan yang muncul dari pandangan tentang belajar dalam lingkup pendidikan tersebut merupakan salah satu implikasi etis dari, apa yang Sandel (2012) sebut

sebagai insentivisme. Insentivisme adalah pandangan yang menempatkan insentif sebagai subjek persoalan ekonomi yang sesungguhnya dan telah menjadi landasan bagi kehidupan masa kini (Sandel, 2012, p. 85). Hal ini dikarenakan manusia selalu bersikap responsif terhadap insentif. Pada gilirannya, insentif hadir sebagai sebuah prinsip yang mengatur interaksi antar individu secara umum. Dalam lingkup pendidikan, insentif turut menentukan kebernilaian dari aktivitas belajar serta subjek ajarnya sendiri. Dari perspektif ini, cabang keilmuan DKV akan kehilangan nilainya apabila tidak ada manfaat ekonomis yang dihasilkan darinya sebagai sebuah insentif.

Pandangan yang miskin tentang pendidikan tersebut tidak dapat tidak turut mengandaikan pemahaman yang reduktif tentang manusia. Dari perspektif utilitarian-ekonomi Jevons, keberadaan manusia (para pekerja) pada gilirannya akan dipahami hanya sebatas homo economicus. Homo economicus adalah “individu rasional yang sepenuhnya menyadari kepentingan ekonomi dari dirinya, dan terdorong untuk mengejarnya dengan sepenuh hati” (Bloom & Rhodes, 2018, p. 141). Jurusan DKV, dari perspektif antropologis ini adalah tidak lebih dari sekadar kendaraan yang diinstrumentalisasi oleh para pemilihnya untuk mengejar kepentingan ekonomi dirinya. Jika demikian, kualitas distingtif atau keunikan dari DKV itu sendiri akan terburamkan oleh selubung instrumental tersebut. Apabila sebuah cabang keilmuan hanya dipahami sebatas instrumen bagi kesejahteraan ekonomis, maka faktor apa yang mendorong seseorang untuk menjatuhkan pilihan pada cabang ilmu A dan tidak pada cabang ilmu B? Mengapa menjatuhkan pilihan pada DKV dan bukan pada cabang ilmu lain yang, misalnya, turut didukung oleh BEKRAF? Atau, dari sekian banyak jurusan yang dapat “dikendarai” untuk menuju kesejahteraan ekonomi, mengapa memilih DKV? Pertanyaan ini akan sulit dijawab apabila kekhasan atau singularity dari sebuah cabang keilmuan tidak lagi dipertimbangkan.

Cara berada manusia sebagai homo economicus ini, dalam pandangan utilitarisme-ekonomi, tidak hanya berciri deskriptif, akan tetapi preskriptif (Bloom & Rhodes, 2018, p. 141). Homo economicus tidak hanya dipahami sebagai adanya manusia, akan tetapi sekaligus merekomendasikan cara hidup tertentu sebagai makhluk yang berkepentingan diri. Pandangan ini sesungguhnya mengucilkan perspektif lain, yang berlawanan, tentang perilaku manusia sebagai makhluk altruistik. Dari perspektif ini, tindakan seseorang tidak dimotivasi oleh kepentingan dirinya, akan tetapi didorong oleh kehendak untuk memberi manfaat kepada orang lain, demi kepentingan orang lain tersebut (Kraut, 2020). Singkatnya, seseorang dapat terdorong untuk bertindak demi kebaikan orang lain di luar dirinya sendiri. Kendati perspektif ini juga turut dapat diperdebatkan, namun kepedulian terhadap kebaikan orang lain adalah sisi dari kemanusiaan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Pengabaian perspektif ini, pada gilirannya, akan mencerabut ilmu pengetahuan pada umumnya dan DKV pada khususnya, dari dimensi politisnya.

Pencerabutan DKV dari dimensi politisnya tidak menunjuk ke penghalauan seorang desainer dari proyek-proyek desain untuk kepentingan propaganda partai-partai politik, namun dari pemahaman bahwa desain sudah selalu politis. Pernyataan bahwa desain sudah selalu politis merujuk pada pengertian bahwa desain tidak dapat

dilepaskan dari nilai-nilai dan asumsi yang mendasarinya, atau dari ideologi yang melatarbelakanginya (Pater, 2016, p. 2). Dalam konteks DKV, komunikasi sudah selalu dipengaruhi oleh asumsi ideologis tertentu dan tidak pernah sepenuhnya netral. Sebagai contohnya, rancangan komunikasi visual dalam iklan produk-produk fashion ataupun otomotif yang melibatkan sosok perempuan. Dalam rancangan tersebut, perempuan kerap divisualisasikan sebagai sosok yang pasif dan tampil menjadi objek hasrat kaum lelaki (Pater, 2016, p. 113). Hal ini sesungguhnya merupakan salah satu penjelmaan konkret dari asumsi tertentu tentang ketidaksetaraan antara lelaki dan perempuan: lelaki sebagai sosok yang aktif dan kuat, sedangkan perempuan adalah sosok yang pasif dan lemah. Apabila para individu pelaku di dalam lingkup DKV bersikap permisif terhadap hal ini dan hanya peduli dengan persoalan kesejahteraan ekonominya, maka DKV turut berperan merawat ketidaksetaraan di dalam kehidupan sosial, yang berujung pada pelemahan demokrasi itu sendiri. Contoh tersebut merupakan cerminan tentang dimensi politis dari desain dan sekaligus konsekuensinya apabila dimensi tersebut diabaikan dengan berlandaskan pandangan utilitarian ekonomi yang diyakini.

Ketercerabutan tersebut sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi sebuah disiplin atau cabang ilmu, namun termasuk juga institusi penyelenggaranya, yakni universitas. Universitas turut dilucuti dari perannya sebagai sebuah ruang demokratis (Giroux, 2009, p. 671). Ruang dimana etos-etos demokrasi seharusnya dipupuk, dipraktikkan, serta diteruskan ke setiap generasi. Berbasis keyakinan yang menciutkan pendidikan sebagai instrumen kesejahteraan ekonomis, universitas semakin meninggalkan perannya sebagai ruang tersebut dan bersekutu dengan kekuasaan perusahaan-perusahaan swasta komersial serta nilai-nilai pasar. Gagasan-gagasan seperti misalnya, kesetaraan, yang krusial bagi demokrasi, menjadi terpinggirkan. Nilai-nilai demokratis semakin terusir ketika nilai-nilai pasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dimahkotai; ketika yang politis digelincirkan ke yang ekonomis.

PENUTUP

Rekomendasi Jevons bagi relasi antara pendidikan bagi para tenaga kerja dengan kesejahteraan ekonominya sebetulnya dilatari oleh tujuan yang mulia, yakni pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan sendiri merupakan bagian dari agenda reformasi sosialnya. Secara teoritis, pandangan utilitariannya sendiri berharga sebagai salah satu perspektif filosofis untuk menerangi pemahaman tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Secara umum berkenaan dengan bidikan prinsipil dari pendidikan tinggi dan secara partikular, berkaitan dengan gejala eskalasi minat anggota masyarakat untuk memilih jurusan DKV. Pendidikan, dari perspektif Jevons, memiliki peran terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi, yang dari perspektif utilitariannya, merupakan paradigma dari kebahagiaan itu sendiri. Perspektif yang secara populer tidak bertentangan dengan common sense yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tidak sedikit dari kita mensejajarkan kemapanan ataupun kebahagiaan dengan kesejahteraan ekonomi. Banyak juga dari kita yang memahami pendidikan sebagai sarana untuk mencapainya.

Kendati demikian, apabila kita konsisten sungguh dengan pemikiran Jevons, beberapa permasalahan etis, antropologis, dan politis terkait pendidikan, tidak dapat dihindari. Permasalahan etis berkenaan dengan nilai dari aktivitas belajar itu sendiri. Otonomi dari aktivitas belajar tidak lagi mendapatkan ruangnya ketika kebernilaian darinya bergantung pada insentif atau dampak ekonomisnya. Jevons memang tidak secara vulgar menyarankan agar sebuah disiplin atau cabang ilmu tertentu dipahami sebagai bagian dari sektor ekonomi; sebagaimana berlaku sebagai pengertian umum masa kini. Kesadaran akan pentingnya menabung agar mampu membeli kenikmatan (komoditas) merupakan insentif dari keterdidikan seseorang. Sekilas tidak ada yang salah dengan hal ini. Biarpun demikian, aktivitas belajar tidak harus selalu kehilangan nilainya jika darinya manfaat ekonomis tidak muncul sebagai konsekuensinya. Kesadaran akan batas sekaligus kemungkinan dari pengetahuan, dari pikiran, dari kemanusiaan kita, yang diperoleh dari aktivitas belajar tidak kalah berharganya.

Bicara tentang kemanusiaan, permasalahan antropologis tentang manusia muncul tak terelakkan. Jevons memposisikan manusia, khususnya para pekerja, sebagai individu berkepentingan diri yang harus ditingkatkan kesejahteraan ekonominya. Hal ini, pada gilirannya, akan mereduksi manusia sebagai homo economicus semata. Homo economicus yang rasional-kalkulatif serta selalu mengejar kepentingan dirinya agar bahagia atau sejahtera secara ekonomi. Penekanan Jevons tentang manusia sebagai pengada yang berkepentingan diri (self-interested being) pada akhirnya memencilkan kemungkinannya sebagai, misalnya pengada altruistik.

Selanjutnya, permasalahan politis yang berkenaan dengan pemahaman Jevons tentang pendidikan itu sendiri pada gilirannya juga terimplikasikan. Apabila pendidikan dipentingkan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, hal ini pada gilirannya akan menceraabut keilmuan serta institusinya dari kepedulian politisnya. Isu seperti kesetaraan, yang krusial bagi demokrasi, tidak akan mendapatkan ruangnya yang proporsional ketika sebuah keilmuan hanya dipahami sekadar sarana instrumental bagi pengejaran kepentingan ekonomi dari diri serta universitas dipahami sebatas wadah institusional yang mengkomodasinya.

Sejauh dari apa yang telah disampaikan, perlu ditekankan bahwa isi dari tulisan ini tidak hendak menentang seutuhnya pandangan tentang bagaimana pendidikan dapat berkontribusi bagi kesejahteraan ekonomi. Isi tulisan juga tidak menolak sepenuhnya pandangan tentang kesejahteraan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari kebahagiaan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pandangan utilitarian ekonomi dari Jevons terbebas dari kesulitan. Kesulitan menunjuk ke gagasan mendasar Utilitarisme pada umumnya tentang kenikmatan atau kebahagiaan. Penentuan nilai kebahagiaan atau kenikmatan sebagai konsekuensi dari sebuah keputusan, sulit dipastikan (Sudarminta, 2013, p. 132). Dari perspektif Utilitarisme, sebuah tindakan atau pengambilan keputusan dinilai bermoral apabila darinya kebahagiaan atau kenikmatan terbesar dapat diperoleh. Hal ini dimungkinkan dengan cara melakukan kalkulasi rasional sebelum bertindak atau mengambil keputusan. Kendati telah diperhitungkan secara rasional, bagaimana kita dapat menentukan nilai (atau seberapa hebat) kebahagiaan yang akan diperoleh dari sebuah tindakan? Sebagai

contohnya, di antara pergi menonton film, menyaksikan pertunjukkan konser musik, atau membaca novel di rumah, aktivitas apa yang paling besar membawa kenikmatan? Kesulitan pasti akan ditemui apabila pertimbangan situasional tidak dilibatkan dan keputusan hanya dilandasi pada kalkulasi rasional semata. Dalam lingkup persoalan eskalasi minat terhadap jurusan DKV, kesulitan serupa juga sulit dihindari apabila kita hendak konsisten dengan pandangan Jevons yang menempatkan pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh kenikmatan (kesejahteraan ekonomi) terbesar atau paling bernilai. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa kenikmatan terbesar dapat diperoleh dengan memilih jurusan DKV padahal DKV sendiri bukanlah satu-satunya jurusan yang didukung oleh BEKRAF? Tidakkah keputusan kita turut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berciri situasional serta kualitatif (misalnya minat atau hasrat pribadi) atau non-kalkulatif? Kalkulasi rasional memang dapat membantu kita untuk mengambil keputusan dalam kehidupan, namun tidak serta-merta selaras dengan kebahagiaan atau kenikmatan. Kebahagiaan adalah persoalan nilai atau bersifat kualitatif, bukan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adit, A. (2023, Oktober 31). 9 Peluang Lulusan DKV, Apa Saja Itu? Kompas. <https://edukasi.kompas.com/read/2023/10/31/094706471/9-peluang-kerja-lulusan-dkv-apa-saja-itu?page=2>
- Adityawan, A. (2007, December 16). Beberapa Permasalahan dalam Perkembangan Pendidikan Tinggi DKV di Indonesia. Desain Grafis Indonesia. <http://dgi.or.id/academic-writing/beberapa-permasalahan-dalam-perkembangan-pendidikan-tinggi-dkv-di-indonesia.html>
- Bentham, J. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press.
- Boone, B. (2017). *Ethics 101: From Altruism and Utilitarianism to Bioethics and Political Ethics, an Exploration of the Concepts of Right and Wrong*. Adams Media.
- CNN. (2024, July 24). Jarang yang Tahu, 9 Jurusan Kuliah Ini Sepi Peminat dan Bergaji Tinggi. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240722094124-561-1123964/jarang-yang-tahu-9-jurusan-kuliah-ini-sepi-peminat-dan-bergaji-tinggi>
- Disas, E. P. (2018). Link and Match sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 18 (2). <https://doi.org/10.17509/jpp.v18i2.12965>
- Dowding, K. (2011). *Encyclopedia of Power*. SAGE Publication, Inc.

- Driver, J. (2014, September 22). The History of Utilitarianism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/utilitarianism-history/>
- Farisa, F. C., dan Bayu, G. (2021, July 27). Jokowi Minta Kampus Didik Mahasiswa dengan Kurikulum Industri, Bukan Dosen. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/13285771/jokowi-minta-kampus-didik-mahasiswa-dengan-kurikulum-industri-bukan-dosen?page=all>
- Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. Basic Books.
- Giroux, H. (2009). Democracy's Nemesis: The Rise of the Corporate University. Cultural Studies <-> Critical Methodologies, Vol. 9, No. 5. <https://doi.org/10.1177/1532708609341169>
- Giroux, H. (2002). The Corporate War Against Higher Education. Workplace, Vol. 9. <https://doi.org/10.14288/workplace.v0i9.184051>
- Jevons, W. S. (1905). The Principles of Economics: A Fragment of a Treatise on the Industrial Mechanism of Society and Other Papers. Macmillan and Co.
- Jevons, W. S. (1911). Theory of Political Economy (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Jevons, W. S. (1883). Methods of Social Reform and Other Papers. Macmillan and Co.
- Kemendikbud. (n.d.). Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2024. Kemendikbud. <https://dikti.kemdikbud.go.id/epustaka/buku-panduan-merdeka-belajar-kampus-merdeka-mbkm-2024/>
- Kemenparekraf. (2021, October 8). Desain Komunikasi Visual Salah Satu Subsektor Ekraf Kekinian yang Menjanjikan. Kemenparekraf/Baparekraf RI. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Desain-Komunikasi-Visual-Salah-Satu-Subsektor-Ekraf-Kekinian-yang-Menjanjikan>
- Kraut, R. (2020). Altruism. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/altruism/>
- Manovich, L. (2013). Software Takes Command. MIT Press.
- Mill, J. S. Utilitarianism and On Liberty - Including Mill's 'Essay on Bentham' and selections from the writings of Jeremy Bentham and John Austin (M. Warnock, Ed.) (2nd ed.). Blackwell.
- Pater, R. (2016). The Politics of Design. BIS Publishers.
- Peart, S. J. (1990). Jevons' Applications of Utilitarian Theory to Economic Policy. Utilitas, Vol. 2 (2). Oxford University Press.

- Peart, S. J. (1996). *The Economics of W. S. Jevons*. Routledge.
- Prastiwi, M. dan Dian, I. (2023, October 10). 9 Alasan Pilih Jurusan DKV, Calon Mahasiswa Cek. Kompas. <https://www.kompas.com/edu/read/2023/10/10/093000371/9-alasan-pilih-jurusan-dkv-calon-mahasiswa-cek>
- Precalya, H. M. (2022). Liberalisme Pendidikan dan Wacana Link and Match Sekolah Kejuruan di Indonesia. *Jurnal BASICEDU*, Vol. 6 (4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3310>
- Ritonga, A. A., Alya, Z., Zainul, Z., Salma, P. K., Try, A. S., Yousa, P. (2023). Perkembangan Dunia Desain Komunikasi Visual di Indonesia. Scribd. <https://www.scribd.com/document/688489959/Perkembangan-Dunia-DKV-Di-Indonesia>
- Rizki, D. (2023). Perkembangan Keilmuan DKV di Era Digital dan Implikasinya terhadap Kurikulum. *Jurnal Desain dan Media*, Vol. 15 (1), 45–52.
- Sandel, M. J. (2012). *What Money Can't Buy: The Moral Limits of the Markets*. Farrar, Strauss and Giroux.
- Setiawan, B. (2020). Transformasi Pendidikan DKV di Indonesia dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Seni Rupa dan Desain*, Vol. 8 (2), 92–100.
- Suarez-Villa, L. (2009). *Technocapitalism: A Critical Perspective on Technological Innovation and Corporatism*. Temple University Press.
- Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Kanisius.
- Tim Penulis Kumparan. (2024, May 15). Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga yang Dibentuk Presiden RI pada 20 Januari 2015. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-terkini/badan-ekonomi-kreatif-lembaga-yang-dibentuk-presiden-ri-pada-20-januari-2015-22k6BOBdCBD/full>
- Tännsjö, T. (2002). *Understanding Ethics: An Introduction to Moral Theory*. Edinburgh University Press Ltd.
- Vaggi, G., & Groenewegen, P. (2003). *A Concise History of Economic Thought: From Mercantilism to Monetarism*. Palgrave Macmillan.